**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Thailand merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia tenggara.Dimana Negara– Negara yang ada di dalam kawasan Asia tenggara merupakan Negara – Negara yang termasuk Negara – Negara dunia ketiga yaitu Negara yang termasuk kedalam Negara berkembang. Thailand sendiri berbatasan langsung dengan negara Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia.[[1]](#footnote-1)

Thailand negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) yang sejak berlakunya sistem konstitusi kerajaan tahun 1932 diguncang 15 kali kudeta (19 kali kudeta sampai tahun 2014) merupakan satu – satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami getir dan pahitnya penjajahan asing. Namun senantiasa dibuat panas oleh gerilyawan komunis – komunis sejak tahun 1960-an.[[2]](#footnote-2)

Krisis politik Thailand pada tahun 2014 berawal dari unjuk rasa di ibukota Bangkok tahun 2013 yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Pemerintahan pimpinannya dianggap dikendalikan oleh saudaranya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Upaya Perdana Menteri Yingluck dengan menggelar pemilu dini tidak berhasil memecah kebuntuan politik setelah kubu oposisi memboikot pemungutan suara.[[3]](#footnote-3)

Kudeta Thailand 2014 terjadi pada 22 Mei 2014, ketika anggota-anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand melancarkan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.Pernyataan kudeta ini hanya berselang dua hari setelah militer menyatakan kondisi darurat militer di Thailand. Namun, saat itu militer menegaskan keadaan darurat itu bukanlah sebuah kudeta. Saat kondisi darurat diumumkan, ribuan tentara didukung persenjataan dan kendaraan tempur disebar ke lokasi-lokasi vital, seperti pusat-pusat perekonomian, stasiun televisi, dan kawasan-kawasan perhotelan. Kudeta ini ditempuh setelah pernyataan keadaan darurat pada Selasa 22 Mei 2014 menyusul krisis politik yang melanda negara itu sekitar enam bulan belakangan.

Pada tanggal 24 Juni 2014. Kelompok penentang militer Thailand melakukan aksi demo. Aksi demo ini bertujuan untuk memulihkan demokrasi dan menentang kediktatoran militer Thailand. Aksi demo tersebut dipimpin oleh Ketua Partai Puea Thai, Jarupong Ruangsuwan.

Mengutip dari Reuters, (24/6/2014), Jarupong mengatakan bahwa dewan militer tidak mempunyai legitimasi merebut kekuasaan di Thailand dan mereka perlu mengembalikannya kepada rakyat. Jarupong menganggap bahwa militer memiliki tujuan untuk menciptakan struktur boneka baru. Hal ini akan menyebabkan adanya kubu-kubu baru antidemokrasi dalam tubuh politik Thailand. Sehingga dapat menghambat perkembangan sistem demokrasi Thailand.

“Setiap struktur tersebut perlu dihapus sebelum fase yang lebih demokratis dan beradab dapat dibangun oleh masyarakat Thailand”

Sebelumnya, pihak militer melakukan aksi kudeta Pemerintah Thailand pada 22 Mei 2014. Kudeta ini muncul usai masyarakat Thailand melakukan aksi protes pada Pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra selama berbulan-bulan.Kudeta tersebut menuai banyak kecaman dari sejumlah negara Barat. Mereka menuntut militer Thailand untuk mengembalikan kekuasaan pada rakyat. Amerika Serikat dan Uni Eropa pun dikabarkan memutus sejumlah kerja sama dan kunjungannya ke Thailand.[[4]](#footnote-4)

Thailand berpartisipasi penuh dalam organisasi internasional dan regional. Negara ini tetap menjadi anggota aktif ASEAN dan telah mengembangkan hubungan yang semakin dekat dengan anggota ASEAN lainnya: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Kerjasama regional ini mengalami kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan, perbankan, politik, dan hal-hal budaya.[[5]](#footnote-5)

Di tahun 2015 ini, seluruh negara anggota ASEAN akan memasuki sebuah babak baru dalam kehidupan organisasi, yakni sebuah *ASEAN Community.* Sebagaimana tertera dalam *ASEAN Charter*, maka negara – negara anggota ASEAN akan melibatkan diri dalam tiga tataran sekaligus, yakni: (a) *Economic Community*, (b) *Political and Security Community*, dan (c) *Sociocultural Community*. [[6]](#footnote-6)

Dari tiga pilar utama penyatuan di atas, *ASEAN Economic Community* (AEC)akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di tahun 2015. AEC memandang karakteristik kunci berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (c) wilayah pembangunan ekonomi yang adil, dan (d) daerah sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global.[[7]](#footnote-7)

AEC ini mencakup, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan, pengakuan kualifikasi profesional, mengenai kebijakan ekonomi makro dan keuangan, tindakan pembiayaan perdagangan, meningkatkan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah ASEAN menjadi wilayah dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.[[8]](#footnote-8)

Dalam menghadapi AEC, semua negara anggota bersiap diri untuk menjadi bagian di dalamnya, yang dapat mengambil keuntungan dari dilaksanakannya, Thailand merupakan salah satu negara dari lima negara anggota ASEAN lainnya yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Sehingga Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat untuk menyambut ASEAN Community yang rencananya akan direalisasi pada akhir tahun 2015.

Pemerintah Thailand membuat Surat Keterangan “Awarness” dalam menyambut ASEAN Community 2015. Mereka mulai memberlakukan atau memasukan Kurikulum tentang ASEAN ke sekolah – sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi dan mereka juga diwajibkan untuk mempelajari salah satu bahasa dari 9 negara anggota ASEAN lainnya.[[9]](#footnote-9)

Kesamaan produk antar negara-negara anggota ASEAN menjadikan negara – negara anggota ASEAN saling bersaing dalam memasarkan komiditi – komiditi seperti, minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia, karet antara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Pariwisata merupakan produk yang dimiliki oleh semua negara anggota ASEAN namun hanya beberapa yang memanfaatkannya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Pariwisata merupakan sektor penting yang diutamakan oleh beberapa Negara karena memiliki peluang besar untuk berkembang. Banyak negara bergantung dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Thailand untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Penghasilan utama Thailand berasal dari sektor pariwisata. jika pariwisata di Negara tersebut tidak ada, maka Negara itu akan collapse. Ketika ada jam malam, itu tidak akan berlangsung lama, yang merasakan langung terhadap jam malam adalah masyarakat kelas bawah yang usahanya tergantung pada pariwisata.[[10]](#footnote-10)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sumber daya alam merupakan salah satu produk yang dapat dipromosikan dalam pariwisata, banyak wisatawan yang datang karena tertarik akan keindahan alam yang bertempat di suatu negara. Daya saing sumber daya manusia juga perlu diperhatikan karena jika negara itu tidak dapat mengurus atau mengemasproduknya dengan baik, maka negara itu akan kalah saing.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari kejadian tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi: **KUDETA THAILAND (2014) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESIAPAN THAILAND MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 : ANALISIS TERHADAP SEKTOR PARIWISATA.**

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**
2. Bagaimana efek kudeta terhadap pariwisata Thailand?
3. Apa kendala persiapan Thailand menghadapi AEC dengan adanya kudeta?
4. Bagaimana prospek pengembangan pariwisata Thailand pasca kudeta?
5. **Pembatasan Masalah**

 Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan – batasan terhadap masalah yang dikaji dan topik yang akan diteliti sesuai dengan judul “Kudeta Thailand (2014) dan Implikasinya Terhadap Kesiapan Thailand Menghadapi ASEAN Economic Community 2015: Analisis Terhadap Sektor Pariwisata Thailand”.Mengingat luasnya permasalahan, terbatasnya waktu dan sekaligus terbatasnya dana, maka penulis akan membatasi hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini sehingga penulis dapat lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Di dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada tiga cakupan, yaitu latar belakang dan proses terjadinyaKudeta di Tahun 2014,tinjauan tentang pariwisata Thailand dan pengaruh Kudeta di tahun 2014 terhadap persiapannya menghadapi AEC. Penulis menjelaskan latar belakang dan kronologis secara singkat kasus kudeta di Thailand pada tahun - tahunsebelumnya sertabagaimanakebjiakan pemerintah mengenai strategi persiapan Thailand menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah hal-hal yang telah pemerintah lakukan, baik dalam penataan industri pariwisata ataupun kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan utuk mengaturnya.Kudeta atau junta militer yang di maksud adalah kudeta pada tahun 2014 dimana penulis melakukan penelitian langsung. Mengenai objek-objek pariwisata dan infrastruktur, penulis hanya memaparkan apa yang memang penulis amati selama satu minggu berada di sana, penulis hanya mengamati objek wisata di sekitar Bangkok dan Krabi, diantaranya Daerah Pratunam, Khaosan Road, Siam Paragon, Grand Palace, Chao Phraya, Wat Arun, Kuil Loha Prasat, Wat Ratchanaddaram, Daerah Krabi, sekitar pantai Ao Nang dan pantai Nopparattara. Industri pariwisata yang dimaksud adalah industri-industri sektor hilir, seperti travel dan agen-agen tur di Bangkok dan Krabi.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penulis dapat merumuskan masalah menjadi : ***Bagaimana kudeta Thailand berimplikasi terhadap persiapan Thailand menghadapi ASEAN Economic Community di sektor pariwisata?***

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian jelas mempunyai tujuan yang didasarkan pada kepentingan serta motif-motif individu maupun kolektif, adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam membahas tugas ini:

1. Untuk mengetahui efek kudeta terhadap kepariwisataan di Thailand.
2. Untuk mengetahui kendala persiapan Thailand menghadapi ASEAN Economic Community dengan adanya konflik.
3. Untuk mengetahui prospek kesiapan pariwisata Thailand menghadapi ASEAN Economic Community.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui implikasi dari terjadinya kudeta terhadap persiapan pariwisata Thailand.
2. Menambah pengetahuan memperluas wawasan dan pola pikir penulis serta dapat menjadi masukan bagi penstudi lain.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pembanding pariwisata Thailand dan Pariwisata Indonesia khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi AEC.
4. Sebagai laporan skripsi tugas akhir studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
5. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
6. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran teoritis merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian. Kerangka teori adalah suatu kumpulan teoritis model literatur yang menjelaskan hubungan - hubungan dalam masalah tertentu. Dalam bagian ini peneliti berusaha menjelaskan masalah yang akan diteliti dengan memakai beberapa teori sehingga hipotesis dapat dirumuskan. Membangun kerangka teoritis dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih kejadian atau pelaku.[[11]](#footnote-11)

Dalam menjalin suatu hubungan pasti terbumbui dengan kerjasama dan konflik. Konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat. Kudeta Thailand berawal dari adanya konflik antara masyarakat dan perdana menteri yang dianggap mengecewakan. Kudeta ini memicu ketidakstabilan politik dan konflik antara kaum royalis reaksioner, yakni kubu Kaus Kuning, dan para pendukung Thaksin, Kaus Merah, yang berlangsung selama lima tahun. Tahun 2007 partai pro-Thaksin memenangkan pemilu namun kemudian dilarang menduduki jabatannya oleh keputusan pengadilan tahun 2008, yang sebenarnya adalah kudeta yudisial.Selama periode tersebut, titik kritis terjadi pada tahun 2010 ketika pengunjuk rasa kaos merah menggelar demonstrasi besar menentang pemerintahan terpilih, Abhisit Vejjajiva. Ini secara brutal diremukkan dengan aksi kekerasan oleh kaum monarkis.

Kudeta (bahasa Perancis: coup d'État pengucapan bahasa Perancis: [\ˌkü-(ˌ)dā-ˈtä\], atau disingkat coup pengucapan bahasa Perancis: [\ˈkōp\], berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara) adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "penggambilalihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).

Ilmuwan ilmu politik Samuel P. Huntington mengidentifikasi kudeta menjadi tiga kelas, yakni;[[12]](#footnote-12)

1. Kudeta sempalan, dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dapat terdiri dari militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan tradisional saat itu, kemudian melakukan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru.
2. Kudeta wali, dilakukan oleh sekelompok pengkudeta yang akan mengumumkan diri sebagai perwalian dalam rangka meningkatkan ketertiban umum, efisiensi, dan mengakhiri korupsi, para pemimpin kudeta akan menggambarkan tindakan mereka hanyalah tindakan sementara dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada umumnya, kudeta wali sering dilakukan dengan cara mengubah bentuk pemerintahan sipil menjadi bentuk pemerintahan militer.
3. Kudeta veto, dilakukan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial dari sekelompok massa rakyat dalam melakukan penekanan berskala besar yang berbasis luas pada oposisi sipil.

Kerahasiaan agenda, tidak hanya berlaku vis-à-vis terhadap kalangan luar, tetapi juga vis-à-vis terhadap konspirator lainnya merupakan senjata pertama junta, tanpa persiapan yang terbaik maka kudeta dipastikan akan gagal.

1. Terjadi dalam Kapp Putsch di Berlin pada tahun 1920 karena kurang matangnya kebijakan dari Jenderal von Luttwitz, komandan operasi, yang pada tanggal 10 Maret memberikan ultimatum kepada para pemimpin sosialis untuk melarikan diri dalam waktu 48 jam sebelum terjadinya kudeta militer yang diumumkan pada malam 12-13 Maret 1920.
2. Ketika mempersiapkan pemberontakan 8 November 1942 di Aljazair (yang memungkinkan keberhasilan Operasi Obor), pemimpin muda dari Kelompok Aksi Aljazair, José Aboulker, menolak untuk memberikan nama-nama pemimpin kelompok dua hari sebelum tindakan kudeta kepada Henri d'Astier de la Vigerie, kepala konspirasi untuk Afrika Utara, meskipun ia termasuk dalam kelompok perencana kudeta dan ketika Patriot mulai beraksi malah terjadi kejutan dengan munculnya tidak kurang dari 400 warga sipil bersenjata berikut perwira pasukan cadangannya yang kemudian berhasil menetralisir Korps Angkatan Darat Vichy Aljazair, dan pemerintahan Vichy Perancis dengan leluasa dapat dibebaskan setelah beberapa jam dan kembali ke kota, kemudian dapat menguasai kembali dan menangkap para pelaku kudeta pada saat malam pendaratan di pantai.

Kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang akan dihilangkan dari sistem politik. Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan di balik kudeta, baik yang klise demi kesejahteraan umum, tertib sosial, penegakkan hukum ditolak keberadaannya. Termasuk dengan kudeta yang akhir-akhir ini terjadi di Thailand.[[13]](#footnote-13)

Kudeta sebagai proses politik yang dilakukan militer untuk mendapatkan kekuasaan sudah menjadi perhatian seorang Eric Nodlinger. Menurut Nodlinger, kudeta merupakan salah satu pilar kunci bagi para perwira militer pretorian untuk mengambil alih kekuasaan. Bahkan untuk membenarkan tindakan kudeta tersebut, kelompok perwira militer pretorian harus merekayasa secara sistematis tentang prakondisi ekonomi dan politik suatu negara menjadi tidak menentu.

Biasanya kudeta oleh kelompok pretorian ditandai dengan situasi ekonomi yang memburuk, seperti tingginya angka inflasi, turunnya nilai mata uang secara dramatis, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Situasi politik cenderung ditandai dengan terjadinya konflik horisontal yang tidak bisa diselesaikan oleh politisi sipil secara komprehensif. Bahkan bisa juga terkait dengan issue separatisme oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja politisi sipil.

Dalam konteks situasi ekonomi dan politik ini, para perwira militer pretorian seringkali menerapkan strategi wait and see. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan collapse masyarakat sipil, dan bahkan bisa juga dengan meningkatkan eksklasi meluasnya ketidakpercayaan sipil kepada pemerintah yang sedang berkuasa dengan perilaku disobedience. Artinya militer merasa perlu untuk mendesain situasi, agar tatkala militer melakukan kudeta sudah tepat dengan momentum politik, ekonomi dan psikologis masyarakat sipil.[[14]](#footnote-14) Namun, kudeta di Thailand selalu berakhir pada konflik dikarenakan adanya masyarakat pro-demokrasi dan anti-demokrasi. Menurut Lewis A. Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu[[15]](#footnote-15):

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
2. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Menurut Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih saying yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut.

Konflik juga mengarah pada pembentukan koalisi dan asosiasi antara pihak-pihak yang sebelumnya tidak berhubungan. Jika beberapa pihak menghadapi lawan yang sama, obligasi cenderung untuk berkembang di antara mereka. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kelompok-kelompok baru atau mengakibatkan sebuah peranan asosiasi dalam menghadapi ancaman umum. Singkatnya, konflik dengan beberapa individu atau kelompok akan menghasilkan asosiasi dengan orang lain. Namun, penyatuan yang terjadi ketika koalisi dibentuk hanya untuk tujuan bertahanan diri. Aliansi hanya bisa menjadi ekspresi keinginan kelompok 'untuk mempertahankan diri. Tentu saja, aliansi tersebut dapat dirasakan oleh kelompok lain sebagai ancaman. Hal ini dapat menyebabkan terciptanya koalisi dan asosiasi baru, sehingga menarik kelompok ke dalam hubungan sosial baru.[[16]](#footnote-16)

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara state actor dan non state actor. Hubungan Internasional (HI; sering disebut Studi Internasional (SI), meski keduanya tidak sama) adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC)[[17]](#footnote-17).

Di dalam Hubungan Internasional, dikenal beberapa teori seperti Realisme, Liberalisme, Konstruktivisme, dan Marxisme. Kudeta diketahui sebagai HI realisme. Realisme adalah mazhab teori hubungan internasional. Realisme adalah "spektrum ide" yang berpusat pada empat ide utama, yaitu:[[18]](#footnote-18)

1. Sistem internasional bersifat anarki.
	* Tidak ada aktor di atas negara yang mampu mengatur interaksinya; negara harus membina sendiri hubungan dengan negara lain, tidak diatur oleh entitas yang lebih tinggi.
	* Sistem internasional ada dalam keadaan antagonisme tetap.
2. Negara adalah aktor terpenting.
3. Semua negara di dalam sistem adalah aktor tunggal yang rasional
	* Negara cenderung mengejar kepentingan pribadi.
	* Kelompok berusaha meraup sumber daya sebanyak mungkin
4. Masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan hidup (*survival*).
	* Negara membangun militer untuk bertahan hidup, sehingga bisa menciptakan [dilema keamanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Dilema_keamanan).

Hubungan Internasional tidak lepas dari globalisasi. Proses globalisasi akan terus berlanjut dan berpengaruh pada tatanan dunia termasuk dalam hubungan internasional. Globalisasi belum memiliki definisi yang tepat, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Definisi yang tepat harus bisa mencakup elemen – elemen berikut: jangkauan, intensitas, kecepatan, dan pengaruh. Di *Global Transformation*, David Held mendefinisikan globalisasi sebagai:

**“Meski dalam artian paling sederhananya globalisasi mengacu pada pelebaran, pendalaman, dan pemercepatan interkoneksi global, definisi semacam itu perlu dijelaskan lebih jauh lagi. Globalisasi dapat ditempatkan di dalam satu kontinuum lokal, nasional, dan regional. Di satu ujung kontinuum, terdapat hubungan dan jaringan sosial dan ekonomi yang berbasis lokal dan/atau nasional; di ujung lain, terdapat hubungan dan jaringan sosial dan ekonomi yang menguat pada skala interaksi regional dan global. Globalisasi dapat Merujuk pada proses perubahan ruang waktu yang menopang transformasi susunan kehidupan manusia dengan menghubungkan sekaligus memperluas aktivitas manusia melintasi wilayah dan benua. Tanpa melihat kaitan keruangan seperti itu, istilah ini tidak dapat dirumuskan secara jelas atau runtun.”[[19]](#footnote-19)**

Pengaruh globalisasi di tingkat regional memandang kekuatan komunitas menjadi hal yang penting melalui integrasi kawasan, kerjasama regional, maupun hal penting dalam mewujudkan komunitas yang semakin solidaritas dan terintegrasi.

Organisasi Internasional menurut N.A. Maryan Green adalah

**“Organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian, dimana tiga atau lebih negara-negara menjadi perserta *(An international organization is an organization* *established by a treaty to which three or more states are parties)*.[[20]](#footnote-20) Sedangkan menurut pasal 57 Piagam PBB, *Organisasi Internasional* adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan persetujuan antar pemerintah atau antar negara *(an international organization is on organization established by* *intergovernmental or interstate agreement)”.****[[21]](#footnote-21)*

Dalam buku Clive Archer yang berjudul International Organization, dikatakan bahwa Organisasi Internasional merupakan suatu proses dan perwakilan aspek dari proses yang telah dicapai dalam waktu tertentu. Clive Archer mengkaji Organisasi Internsional berdasarkan jenis dan pengelompokan yang beragam. Clive Archer mengklarifikasi Organisasi Internasional berdasarkan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Organisasi Internasional. Peran Organisasi Internasional dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori[[22]](#footnote-22):

1. Instrumen.

Organisasi Internasional digunakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik luarnegerinya. Suatu instrumen menunjukan tujuannya apabila memperlibatkan kegunaannya dalam periode tahun tertentu yang biasanya terjadi pada *intergovernmental organizations.*

2. Sebagai Arena

Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu anggota – anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah – masalah yang dihadapi. Organisasi Internasional menyediakan tempat – tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul bersama – sama berdiskusi, berdebat, bekerja sama, walaupun saling berbeda pendapat.

3. Sebagai aktor independen

Organisasi dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sejak tahun 1960-an terdapat bukti – bukti bahwa sejumlah entitas termasuk Organisasi Internasional dapat mempengaruhi kejadian – kejadian dunia bila hal ini terjadi. Entitas –entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara.

ASEAN adalah salah satu Organisasi Internasional yang bergerak di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Is a political and economic organisation of ten countrieslocated in*[*Southeast Asia*](http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia)*, which was formed on 8 August 1967 by* [*Indonesia*](http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia)*,* [*Malaysia*](http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia)*,* [*Philippines*](http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines)*,* [*Singapore*](http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore)*, and*[*Thailand*](http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand)*. Since then, membership has expanded to include*[*Brunei*](http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei),[*Cambodia*](http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia),[*Laos*](http://en.wikipedia.org/wiki/Laos),[*Myanmar (Burma)*](http://en.wikipedia.org/wiki/Burma), *and* [*Vietnam*](http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam)*. Its aims include accelerating* [*economic growth*](http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_growth)*,*[*social progress*](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_progress)*,* [*sociocultural evolution*](http://en.wikipedia.org/wiki/Sociocultural_evolution)*among its members, protection of regional peace and stability, and opportunities for member countries to discuss differences peacefully.[[23]](#footnote-23)*

Demi mencapainya sebuah integritas di kawasan Asia Tenggara, ASEAN mendirikan sebuah program yang di sebut dengan ASEAN Community, ASEAN Economic Community merupakan salah satu pilar yang berdiri untuk mewujudkan terintegrasinyasektor ekonomi negara – negara anggota ASEAN.

“***ASEAN Economic Community is the realisation of the end goal of economic integration as espoused in the Vision 2020, which is based on a convergence of interests of ASEAN Member Countries to deepen and broaden economic integration through existing and new initiatives with clear timelines. In establishing the AEC, ASEAN shall act in accordance to the principles of an open, outward-looking, inclusive, and market-driven economy consistent with multilateral rules as well as adherence to rules-based systems for effective compliance and implementation of economic commitments.”****[[24]](#footnote-24)*

Kepentingan nasional suatu negara berbeda dengan negara lain. Hal ini yang menyebabkan dibentuknya kerjasama atau organisasi demi memenuhi kepentingan nasionalnya masing – masing. Kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh negara untuk memenuhi *national interest*-nya disebut dengan *Foreign Policy* (Kebijakan Luar Negeri). *Foreign policy* baru dapat dibentuk setelah national interest dipertimbangkan. Membalik proses ini akan berakibat buruk, yaitu *foreign policy* yang diambil menjadi tidak kredibel dan tidak akan dilegitimasi pihak manapun. Untuk membuat suatu *foreign policy* harus dapat melihat dari tiga sumber, yaitu: sumber sistemik, sumber masyarakat, dan, sumber idiosinkretik.

* 1. Sumber sistemik adalah pertimbangan yang dibuat berdasar situasi eksternal negara.
	2. Sumber masyarakat adalah pertimbangan yang dibuat berdasarkan situasi internal negara.
	3. Sumber idiosinkretik adalah pertimbangan subyektif yang dilakukan berdasarkan kepribadian si pembuat foreign policy.

Dua konsep yang berkaitan karena national interest akan menentukan foreign policy yang harus diambil suatu negara, sementara foreign policy akan membantu negara mewujudkan national interest-nya.

Menurut K.J. Holsti: politik luar negeri adalah

*“****Foreign policy also incorporates ideas that are planned by policy makers in order to solve a problem or uphold some changes in environment, which can be in the forms of policies, attitudes, or actions of another states or states****”*[[25]](#footnote-25)*.*

Thailand merupakan salah satu negara yang mengandalkan industri pariwisata sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang berperan besarbagi pertumbuhan ekonominya. Menurut UU No.10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.[[26]](#footnote-26)

 Prof. Kurt Morgenroth, kepariwisataan dalam arti sempit, adalah:

**“Lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.”**[[27]](#footnote-27)

 Unsur utama dari kepariwisataan adalah wisatawan atau tourism.[[28]](#footnote-28) Dalam pemasaran pariwisata terdapat strategi-strategi pemasaran yang bertujuan menarik wisatawan. Untuk menarik wisatawan agar datang ke negaranya, Negara tersebut perlu pengembangan dan perbaikan aspek-aspek yang menunjang sektor pariwisata agar wisatawan terlayani dengan baik. Dalam strategi pemasaran pariwisata langkah-langkah penting yang harus dilakukan adalah:[[29]](#footnote-29)

* 1. Segmentasi pasar, yaitu proses menggolongkan konsumenkedalam kelompok – kelompok berdasarkan kebutuhan yang berbeda, karakteristik, atau perilaku, dimana setiap kelompok bisa dipilih sebagai pasar sasaran yang akan diraih dengan strategi bauran pemasaran tertentu.

Segmentasi digolongkan menjadi: (a) segmentasi secara demografis yang membagi pasar menjadi kelompok – kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, siklus hidup, pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, kelompok etis. (b) segmentasi secara geografis berarti pembagian wisatawan kedalam kelompok – kelompok berdasarkan unit geografis, seperti asal negara, provinsi, kota, atau wilayah tertentu. (c) segmentasi secara perilaku menggolongkan wisatawan berdasarkan kesamaan pengetahuan, sikap, tingkat penggunaanm maupun respon terhadap suatu produk dan (d) segmentasi berbasis karakteristik psikologis.

* 1. *Targeting*, yaitu tahapan yang dilakukan setelah segmen-segmen pasar diidentifikasi dan dirumuskan untuk dapat menghasilkan daya tarik khusus bagi segmen sasaran (*target market*). Pengetahuan tentang keberadaan segmen – segmen pasar diharapkan bisa memberikan pandangan bahwa wisatawan memiliki karakteristik masing – masing dan sebuah tujuan wisata yang bisa memilih kelompok wisatawan yang dipandang paling menguntungkan.
	2. *Positioning* dan *branding, positioning* adalah penentuan posisi pasar atau produk wisata yang tepat. *Branding* adalahserangkaian proses dan aktifitas untuk menciptakan suatu brand. Brand itu sendiri adalah sebuah penanda yang mengidentifikasi sebuah perusahaan, produk, jasa, tempat, dan lain lain dengan menggunakan simbol yang unik dan membedakannya dengan produk serupa di pasaran.

Hubungan antara politik dan pariwisata digaris bawahi oleh kenyataan – kenyataan yang ada di dalam kerangka dan tubuh politik itu sendiri dalam keseluruhannya. Dengan kata lain, pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan – kegiatan politik suatu negara di mana pariwisata itu berada. Hubungan antara pariwisata dan politik ini tercermin dalam kegiatan aparatur dan organisasi pemerintah dalam keseluruhannya serta bentuk anggapan umum yang dituangkan dalam bentuk peraturan - peraturan, norma – norma, syarat – syarat, larangan – larangan, dan sebagainya yang kemudian dipercayakan kepada instansi, badan, atau organisasi untuk melaksanakan segala tugas yang terumuskan di dalamnya serta memberi interpretasi kepadanya sehingga terwujudnya fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan dalam memajukan industri pariwisata dalam keseluruhannya. Di dalam proses pelaksanaan dan pemberian interpretasi pada aturan – aturan, norma- norma, syarat – syarat, larangan – larangan dan sebagainya itu maka timbul kebijaksanaan kepariwisataan atau “*policy of tourism*”.[[30]](#footnote-30)

Kelompok Ahli (*Group of Experts*) menyatakan bahwa kepariwisataan berkembang sangat pesat sesuai dengan perbaikan keadaan ekonomi dan makin banyaknya orang – orang yang mengadakan perjalanan mencari tempat – tempat baru untuk dikunjungi. Oleh karena itu sangatlah penting bahwa sesuai dengan kemungkinan sumber – sumber ekonominya, suatu negara hendaknya mengusahakan pertumbuhan yang kuat atas sejumlah daerah tujuan wisata baru yang berkembang. Kemungkinan – kemungkinan yang ada untuk menarik wisatawan – wisatawan seperti mendaki gunung, olahraga musim dingin, memancing, berburu, pantai – pantai, spa, taman dan kebun raya nasional, tempat – tempat pertandingan, monumen – monumen nasional, tempat – tempat pemujaan, tradisi dan adat istiadat rakyat, tempat – tempat berziarah, festival, dan peristiwa, peristiwa olahraga, hendaknya juga dipertimbangkan dan dipelihara. Ditekankan pula pentingnya untuk menjamin perlindungan tersebut bukan saja untuk monumen – monumen, peninggalan – peninggalan purbakala dan bangunan – bangunan yang mempunyai arti penting dari segi sejarah, kultural, atau arsitektur, tetapi juga bai adat istiadat, bahasa tradisi, seni, dan kesenian rakyat – rakyat asli. Namun suatu catatan peringatan telah diajukan bahwa perhatian dari negara – negara yang sedang berkembang hendaknya diarahkan pada kenyataan bahwa mereka perlu membangun dan memperkembangkan secara penuh atraksi – atraksi pariwisata yang telah ada sebelum mereka mempergunakan biaya dalam jumlah besar untuk proyek – proyek baru dan barangkali belum pernah dicoba. Pemusatan sumber finansial yang ada pada beberapa atraksi yang telah terbukti baik dianggap lebih tepat dari pada menyebarkan sumber-sumber tersebut secara sedikit pada berbagai bentuknatraksi pariwisata yang diperkirakan mempunyai kemungkinan.[[31]](#footnote-31)

Guna memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan program tahap demi tahap dalam pembangunan industri pariwisata, perlu kiranya dikemukakan bahwa industri pariwisata dibangun atas dasar perwilayahan. Yang dimaksud dengan wilayah pariwisata adalah tempat atau daerah yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalulintas dan fasilitas – fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan. Bila dipelajari dengan teliti definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk menjadi tujuan wisata:[[32]](#footnote-32)

1. Memiliki atraksi atau objek menarik

2. Mudah dicapai dengan alat – alat kendaraan

3. Menyediakan tempat untuk tinggal sementara

 Terkait dengan pendapat *Group of Expert* di bidang kepariwisataan di atas, kudeta di Thailand menimbulkan konflik di dalam masyarakat Thailand itu sendiri yang berakibat berkurangnya jumlah wisatawan asing yang datang. Hal ini tentunya berdampak pada perekonomian Thailand. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan **Yunardi** atase Pendidikan KBRI di Thailand, sektor utama yang dimanfaatkan secara optimal adalah sektor pariwisata. Menurutnya *"Thailand itu penghasilan utamanya berasal dari sektor pariwisata, kalau pariwisatanya ga ada bakal collapse, makanya ketika ada jam malam, tidak akan berlangsung lama, yang merasakan langung terhadap jam malam adalah masyarakat kelas bawah yang usahanya tergantung pada pariwisata, Tahun lalu (2013) ada sekitar 24 juta wisatawan yang datang ke Thailand, pada saat itu Indonesia menargetkan 7 sampai 8 juta wisatawan, jadi jauh sekali jika di bandingkan dengan Thailand".*

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan Hipotesis sebagai berikut:

**“Kudeta Thailand 2014 berupa konflik politik antara kaum royalis reaksioner dan para pendukung Shinawarta, berdampak buruk pada sektor pariwisata Thailand terutama pada kesiapannya menghadapi ASEAN Economic Community”**

Tabel. 1

1. **Tabel Oprasionalisasi Variabel dan Idikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam hipotesis (teoritik)** | **Indikator (empirik)** | **Verifikasi (analisis)** |
| **Variabel Bebas:****Kudeta Thailand 2014 berupa konflik politik antara kaum royalis reaksioner dan para pendukung Shinawarta** | Turunnya Perdana Menteri Thailand dari jabatanKrisis politik ThailandAdanya aksi unjuk rasa | Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand memutuskan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai hukuman, Yingluck dicopot dari jabatannya sebagai perdana menteri bersama sembilan anggota kabinet. Kesalahan Yingluck adalah sewenang-wenang mencopot Kepala Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada 2011.Krisis politik Thailand berawal dari unjuk rasa di ibukota Bangkok yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri.Pemerintahan pimpinannya dianggap dikendalikan oleh saudaranya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Upaya PM Yingluck dengan menggelar pemilu dini tidak berhasil memecah kebuntuan politik setelah kubu oposisi memboikot pemungutan suara.[[33]](#footnote-33)Thailand telah dikoyak oleh aksi unjuk rasa yang ingin menggulingkan pemerintahan sah. Harian Bangkok Post melaporkan dalam krisis enam bulan tersebut, tercatat 25 orang tewas dan lebih dari 700 orang lainnya terluka.[[34]](#footnote-34) |
| **Variabel terikat :****Berdampak buruk pada sektor pariwisata Thailand terutama pada kesiapannya menghadapi ASEAN Economic Community** | Bangkok ShutdownPenurunan jumlah kedatangan turis asing. | Tanggal 28 Februari 2014 Suthep mengumumkan penutupan situs reli di Prathum Wan, Ratchaprasong, Silom dan Asoke pada tanggal 2 Maret 2014, dan meminta maaf kepada orang-orang yang terganggu oleh penduduk Bangkok. The PDRC pindah ke Lumphini Park, menandai akhir dari "Bangkok Shutdown", di mana tahap reli PDRC didirikan. Chaeng Watthana adalah satu-satunya tahap reli tersisa lainnya, diawasi oleh seorang biksu senior yang mengatakan: "Saya tidak akan membongkar atau memindahkan itu (panggung) kemanapun "menyusul pengumuman Suthep itu. Menurut Suthep, dari 3 Maret dan seterusnya, boikot dan gangguan kepentingan bisnis keluarga Shinawatra akan menjadi fokus utama dari gerakan protes anti-pemerintah. (<http://en.wikipedia.org/wiki/2013%E2%80%9314_Thai_political_crisis>, diakses pada tanggal 24 Maret 2015)Akhir 2013 menuju pertengahan 2014 adalah masa pergolakan politik di Thailand. Thailand mengalami penurunan yang dramatis pada jumlah wisatawan yang tiba di negara itu. Keseluruhan jumlah kedatangan menurun 6,65%. <http://www.thaiwebsites.com/tourists-nationalities-Thailand-2014.asp> , diakses pada tanggal 24 Maret 2015) |

Gambar. 1

**4. Skema kerangka Teoritis**

**Konflik**

**Kebijakan Pemerintah**

 **ASEAN Economic Community**

**Masyarakat**

**Ekonomi**

**Pariwisata Thailand**

**Politik**

 **Kudeta Thailand**

**Pemerintah**

**Militer**

1. **METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**
2. **Metode Penelitian**

Deskriptif Analitis, merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.[[35]](#footnote-35)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dan sebagainya)[[36]](#footnote-36)

1. Studi Lapangan

Penelusuran data-data yang dilakukan dengan melibatkan diri dalam lingkungan dimana masalah itu berada.[[37]](#footnote-37)

1. Wawancara

Pengumpulan data dan informasi dengan secara langsung melakukan dialog (tanya jawab) dengan pihak yang telah ditentukan dan dianggap kompeten dengan penelitian.[[38]](#footnote-38)

1. **Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

KBRI di Kerajaan Thailand, *The Embassy of the Republic of Indonesia600-602 Petchburi Road Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand*pada Tanggal 7 September - 13 September 2014.

1. “Thailand”, http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand diakses pada tanggal 19 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Iwan Gayo, Buku Pintar Senior, Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2003, hal. 576 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Kudeta Thailand 2014”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta_Thailand_2014> diakses pada tanggal 22 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Angga Mahaputra, “Anti-Militer Thailand Berdemo Pulihkan Demokrasi”*,* [http://news.okezone.com/read/2014/06/24/411/1003491/anti-militer-thailand-berdemo-pulihkan-demokras*i*](http://news.okezone.com/read/2014/06/24/411/1003491/anti-militer-thailand-berdemo-pulihkan-demokrasi)diakses pada tanggal 22 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. “Thailand”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand>, diakses pada tanggal 19 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Disampaikan oleh Teuku Rezasyah (dosen program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran) pada program ASEAN Community 2015: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia`. Sabtu, 13 April 2013. [↑](#footnote-ref-6)
7. ASEAN Economic Community Blueprint (E-Book) diunduh pada 30 September 2014 dari www.**asean**.org/archive/5187-10.pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara langsung dengan narasumber dari KBRI Di Bangkok pada tanggal 9 September 2014 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hal. 91-92. [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. Surwandono, “Menyoal Teori Kudeta”, <http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/06/29/files/2010/06/MENYOAL-TEORI-KUDETA.doc>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. “Teori Konflik”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik> diakses pada tanggal 22 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lewis Coser, “The Functions of Social Conflict”, <http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/coser.htm> diakses pada tanggal 22 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional>, diakses pada tanggal 22 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://id.wikipedia.org/wiki/Realisme_%28hubungan_internasional%29>, diakses pada tanggal 22 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses pada tanggal 19 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-19)
20. http://ldgn-gilam.blogspot.com/2013/06/pengertian-dan-macam-organisasi.html diakses pada tanggal 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Clive Archer, International Organization, London: Routledge, 2011, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-22)
23. http://en.wikipedia.org/wiki/Association\_of\_Southeast\_Asian\_Nations#cite\_note-10 diakses pada tanggal 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-23)
24. ASEAN Economic Community Blueprint (E-Book) diunduh pada 30 September 2014 dari www.**asean**.org/archive/5187-10.pdf [↑](#footnote-ref-24)
25. K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis, 4th* (London: Prentice Hall, 1983), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-25)
26. <http://wikipariwisata.blogspot.com/2013/06/pengertian-pariwisata.html> diakses pada 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Happy Marpaung, Pengetahuan Kepariwisataan, Edisi Revisi (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2002) hlm. 7. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ike Janita Dewi, Implementasi dan Implikasi Kelembagaan Pemasaran Pariwisata yang Bertanggung Jawab (*Responsible Tourism Marketing*) (Jakarta: Pinus Book Publisher, 2011), Hlm 23-45. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 135. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid, hlm. 196-197.* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm. 64-65. [↑](#footnote-ref-32)
33. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta_Thailand_2014>, diakses pada tanggal 23 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-33)
34. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/506302-militer-thailand-campur-tangan-lagi-di-tengah-konflik-politik>, diakses pada tanggal 24 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-34)
35. http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm diakses pada tanggal 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-35)
36. http://sakalvin.blogspot.com/2013/04/metode-pengumpulan-data-dan-daftar-pustaka.html diakses pada tanggal 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-36)
37. Tim Prodi HI, Pedoman Praktikum Profesi Hubungan Internasional, Bandung: Lab. HI, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)